# URGENSI VISI PERTAHANAN MARITIM PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

**Dr. Peni Hanggarini**
Dosen Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina.

**Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D**
Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional - Universitas Pertahanan RI

Pada awal masa pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014, Indonesia memiliki visi untuk menjadikan negara maritim dan negara kepulauan ini sebagai kekuatan maritim dunia melalui Visi Poros Maritim Dunia (PMD). Visi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: *"Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional."*

Visi ini kemudian dituangkan ke dalam 7 (tujuh) pilar yang mengarah kepada pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan keamanna penegakan hukum dan keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari serta diplomasi maritim.

Namun, perwujudan visi PMD yang dirumuskan dengan baik ini sesuai dengan kondisi geografis indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak berhasil diwujudkan di lapangan. Bahkan pada masa pemerintahan Joko Widodo kedua, implementasi program sebagai turunan dari visi PMD semakin tidak terdengar dengan jelas. Hal ini diikuti dengan kenyataan bahwa sejak awal pemerintahan Prabowo, hampir tidak terlihat pula adanya rencana eksplisit untuk meneruskan perwujudan Visi PMD.

Padahal sejak masa kampanye menjadi Calon Presiden serta di awal masa pemerintahannya, Prabowo telah menunjukkan kecenderungannya untuk menekankan pentingnya geopolitik dalam pertahanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin negara, Prabowo telah memahami pentingnya maritim sebagai aset strategis yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan keamanan bagi Indonesia.

Selain itu, Prabowo yang telah mengundang secara khusus John Mearsheimer, ahli hubungan internasional ke Hambalang untuk memberi pengarahan kepada kabinetnya,

juga telah menegaskan kentalnya pendekatan Realis dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan luar negeri. Hal ini terwujud dengan implementasi kebijakan pertahanan dan luar negeri Prabowo yang kental berdasarkan asumsi Realis yaitu berpegang teguh terhadap kemampuan terhadap diri sendiri (*self-help*) dalam berinteraksi dengan negara lain. Salah satu contoh kebijakannya adalah berupaya memperkuat pertahanan negara namun tetap pula menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan tujuan agar kekuatan pertahanan yang kita miliki tidak menjadi ancaman bagi negara mitra terutama negara tetangga (Benarrivo, 2024).

Tetapi, kekuatan aktor pendukung pertahanan maritim yang pada masa pemerintahan Joko Widodo didukung oleh keberadaan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pada masa pemerintahan Prabowo telah dibubarkan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 140 Tahun 2024, tantang Oganisasi Kementerian Negara, Presiden Prabowo hanya menetapkan 7 (tujuh) Kementerian Koordinator yaitu pada: Bidang Politik dan Keamanan, Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bidang Pemberdayaan Masyarat dan Bidang Pangan.

Mengapa pemerintahan Prabowo Subianto perlu menegaskan visi pertahanan maritimnya?

Suka tidak suka perlu kita akui bahwa negara kita memiliki sumber daya maritim yang sangat kaya. Pertahanan negara perlu diprioritaskan kepada upaya melindungi sumber daya maritim ini. Ruang lingkup pertahanan maritim mencakup aspek kehidupan bangsa dan negara yang luas yaitu penggunaan dan pengelolaan wilayah serta sumber daya yang berada di laut, di bawah laut dan di atas laut dan pemanfaatan posisi geografis. Tingkat keamanan kegiatan pelayaran dan perdagangan di wilayah teritorial laut kita, khususnya di beberapa perairan penting (*choke points*) merupakan ruang lingkup pertahanan maritim yang sangat penting (Hanggarini, 2025) .

**Bagaimana seharusnya pemerintahan Prabowo Subianto menerapkan visi pertahanan maritimnya?**

Dengan semakin dinamisnya hubungan internasional yang melahirkan kian beragamnya cara pandang terhadap fenomena internasional, pemerintahan preesiden Prabowo seharusnya tidak hanya menggunakan satu lensa tunggal untuk meneropong berbagai bentuk ancaman dan potensi ancaman. Pemerintahan baru perlu juga meluaskan pandangan, mempertimbangkan pendekatan lain agar dapat melengkapi cara pandang dalam perumusan kebijakan. Terlebih, ancaman keamanan saat ini adalah multidimensional, tidak lagi sekedar militer dan non militer semata tetapi ancaman hibrida terutama di sekitar wilayah ruang maritim Indonesia.

Dalam kepemimpinan pada aspek

maritim di tingkat regional, kurangnya pengakuan dan persepsi negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia dalam keamanan maritim juga merupakan salah satu faktor yang menentukan lemahnya Indonesia dalam mewujudkan visi kepemimpinan maritim (Samy, 2024). Dalam hal ini pendekatan yang cenderung memperhatikan faktor identitas menjadi penting. Pemerintahan baru perlu menyadari bahwa identitas negara maritim jangan hanya sekadar diciptakan sebagai *self-proclaimed identity* tetapi identitas negara maritim bahkan peran kepemimpinan Indonesia dalam aspek maritim juga perlu diakui oleh negara lain dengan memiliki kebijakan pertahanan maritim yang komprehensif dan berkelanjutan.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran budaya maritim dan *Maritime Domain Awareness* (MDA) untuk perlu dipahami seluruh komponen masyarakat Indonesia terutama anak usia sekolah dan generasi muda. Sebagai negara kepulauan yang memiliki kekuatan maritim maka rakyat Indonesia perlu disadarkan akan pentingnya mempelajari budaya maritim, menjaga budaya dan mempertahankan kekayaan maritim yang kita miliki. Pembelajaran budaya maritim ini tidak hanya ditujukan kepada rakyat Indonesia tetapi perlu menjadi landasan pula bagi perumusan kepentingan pertahanan negara dan pencapaian kepentingan nasional kita dengan negara lain. Pada dasarnya budaya maritim dan diplomasi maritim memiliki keterkaitan. Budaya maritim adalah *soft power* yang dapat menjadi modal diplomasi Indonesia (Hanggarini et al., 2022).

Kekayaan maritim adalah milik seluruh rakyat bukan monopoli kelompok tertentu. Adanya kasus pengaplingan laut di beberapa wilayah di Indonesia yang baru saja terungkap bukan saja merefleksikan ketidakadilan bagi seluruh rakyat tetapi juga adanya kuasa terhadap hak rakyat. Kasus pengaplingan laut sepanjang 30,16 km serta 196 kasus serupa diantaranya terjadi di Bekasi, Jakarta Utara, Batam, Sidoarjo dan Surabaya sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Tempo, 2025) seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperhatikan kesewenangan dalam pengelolaan wilayah maritim negara.

Dengan pertimbangan berdasarkan cara pandang menyeluruh maka rumusan kebijakan pertahanan dan luar negeri terkait pertahanan maritim tentunya akan lebih lengkap sesuai dengan ancaman dan tantangan yang dihadapi saat ini. Dengan dukungan rakyat yang *maritime literate* maka kebijakan pemerintahan baru tentu tidak akan sulit untuk dipahami oleh rakyat.

Langkah kedua yang dapat dilakukan, sebagai negara kepulauan yang memiliki kekuatan maritim maka Indonesia perlu terus menggalang kepercayaan dari negara lain untuk mengakui kepemimpinan (diplomasi) Indonesia di dalam aspek maritim. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai upaya penguatan diplomasi pertahanan maritim. Konsep ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari penggunaan instrumen diplomasi pertahanan dan diplomasi maritim.

Salah satu kepemimpinan Indonesia yang telah berhasil menegakkan kedaulatan maritim dan diplomasi

maritim adalah penyelesaian kasus *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* adalah kepemimpinan Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Association* - IORA (2015-2017) (Jose & Fathun, 2021). Bentuk dan inisiatif baru Indonesia untuk memimpin negara-negara tetangga atau mitranya dalam konteks kerjasama bilateral, regional atau multilateral untuk menghadapi ancaman keamanan maritim perlu dilakukan dalam pemerintahan yang baru. Untuk itulah, kebijakan pertahanan maritim dan diplomasi pertahanan maritim akan berkelindan. Kedua aspek ini tidak akan dapat dihasilkan secara utuh tanpa adanya visi atau orientasi pertahanan maritim yang jelas.

Urgensi dari adanya Visi Pertahanan Maritim di era Pemerintahan Prabowo Subianto sejatinya perlu diuraikan melalui pemaparan secara konseptual yang tertuang dalam kebijakan pertahanan maritim yang komprehensif. Dengan kata lain, visi Pertahanan Maritim dan keberadaan kebijakan pertahanan maritim (*maritime defense policy*) bagi negara kepulauan-maritim seperti Indonesia adalah suatu keharusan.

Kita semua tentu akan menantikan implementasi secara lebih detail visi pertahanan maritim yang pernah dilontarkan Presiden Prabowo kala beliau masih menjabat sebagai menteri pertahanan, dengan mengungkapkan kepada publik konsep pertahanan maritim "Perisai Samudra Nusantara" yang merupakan bagian dari rencana pertahanan Indonesia dalam 25 tahun ke depan yaitu "Perisai Trisula Nusantara" (Indonesia Defense Magazine, 29 Juni 2023).***

**Daftar Pustaka**


Benarrivo, R. (2024). *From Minister to President: Mearsheimerism in Indonesia's Defense Policy Under Prabowo Subianto Administration* (Vol. 9, Issue 2).

Hanggarini, P. (2025). *Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional*. Arta Media Nusantara. http://defensediplomacy.blogspot.co.id/2015/02/aktor-dalam-hubungan-internasional.html

Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. (2022). Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional. *Indonesian Perspective*, *7*(2), 164–179. https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50777

*Indonesia Defense Magazine,* 29 Juni 2023

Jose, H. S., & Fathun, L. M. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia Di IORA Pada Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing. *Jurnal Dinamika Global*, *6*(02), 232–258. https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.624

Samy, M. (2024). External Perceptions and Indonesia ' s Leadership Role in Indo-Pacific Maritime Affairs. *Indonesian Perspective*, *9*(1), 88–107.

Tempo. (2025). *Setelah Pagar Laut Tangerang, Ini Deretan Kasus Pengaplingan Wilayah Perairan Lain*. https://www.tempo.co/ekonomi/setelah-pagar-laut-tangerang-ini-deretan-kasus-pengaplingan-wilayah-perairan-lain-1199856